



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT TIRTA GEMAH RIPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah;
 - b. bahwa modal dasar PT Tirta Gemah Ripah telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) dan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi sebesar 70% (tujuh puluh persen), sehingga kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan modal dasar PT Tirta Gemah Ripah sebesar Rp. 245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) yang dilakukan melalui penyertaan modal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 153);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 85);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT TIRTA GEMAH RIPAH.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21 Seri E), sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 4, diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kewajiban penyertaan modal Daerah pada PT Tirta Gemah Ripah adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari modal dasar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) yang terbagi atas 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh juta) lembar saham.

- (2) Penyertaan modal Daerah pada PT Tirta Gemah Ripah sampai dengan 31 Desember 2012 telah disetor sebesar Rp. 30.600.000.000,- (tiga puluh miliar enam ratus juta rupiah) yang terbagi atas 306.000 (tiga ratus enam ribu) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban penambahan modal disetor sebesar Rp. 214.400.000.000,- (dua ratus empat belas miliar empat ratus juta rupiah).
 - (3) Untuk memenuhi sisa penambahan modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan penyertaan modal Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2014 pada bagian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 70.750.000.000,- (tujuh puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 143.650.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara bertahap, berdasarkan rencana bisnis PT Tirta Gemah Ripah dan kemampuan keuangan Daerah melalui penyertaan modal Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PT Tirta Gemah Ripah.
- B. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan BAB IVA Pasal 5a mengenai Divestasi, sebagai berikut :

BAB IVA

DIVESTASI

Pasal 5a

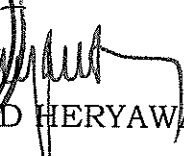
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi pada PT Tirta Gemah Ripah, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Desember 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

ARMAD HERYAWAN



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

WAWAN RIDWAN



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT PADA PT TIRTA GEMAH RIPAH

I. UMUM

PT Tirta Gemah Ripah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH., Nomor 17 tanggal 21 Februari 2003 jo. Akta Perubahan Nomor 30 tanggal 14 Oktober 2005 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 22 Mei 2003 dengan Keputusannya Nomor C.11282.HT.01.01.TH 2003 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah, selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Maudy Lunel Pongtuluran, SH., Nomor 352 tanggal 28 Juni 2013.

Modal dasar PT Tirta Gemah Ripah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah ditetapkan Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) dan Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 51 % (lima puluh satu persen) dari Rp 60.000.000.000,- atau sebesar Rp 30.600.000.000,- (tiga puluh miliar enam ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 306.000 (tiga ratus enam ribu) lembar saham. Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta gemah Ripah sampai dengan 31 Desember 2012 telah dipenuhi melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, pada tahun 2013 Modal Dasar PT Tirta Gemah Ripah akan ditingkatkan menjadi sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) dengan komposisi saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Modal dasar yang diakomodasikan dalam raperda perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006, dengan perubahan ini, maka akan merubah kewajiban penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari sebesar Rp. 30.600.000.000,- (tiga puluh miliar enam ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah).

Untuk merubah kewajiban Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 yang merupakan Dasar hukum/Peraturan Daerah Induk Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah khususnya mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban Penyertaan Modal Daerah, hal ini sejalan dengan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang Berkenaan.

Selain hal tersebut, perubahan Peraturan Daerah ini mengakomodasi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, khususnya terkait dimungkinkannya Pemerintah Daerah untuk melakukan Divestasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Huruf A

Pasal 4

Ayat (1)

Besaran penyertaan modal Daerah pada PT Tirta Gemah Ripah sebesar 70% (tujuh puluh persen) tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 Tentang PT Tirta Gemah Ripah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Huruf B

Pasal 5a

Pasal ini dimaksudkan untuk mengakomodir ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ayat (1)

Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain

Ayat (2)

Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 154